

## **Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar**

(Lili Sabila M Siregar)

### **Abstrak**

Sekolah Dasar merupakan fase pendidikan yang sangat strategis dalam pembentukan karakter anak, di mana peserta didik mulai belajar tentang nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat dan mengenali perbedaan hak serta kewajiban. Implementasi pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar menjadi penting untuk membangun fondasi kesadaran HAM sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan HAM melalui pembelajaran PKn di Sekolah Dasar, dengan fokus pada strategi pengajaran yang digunakan serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengeksplorasi implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan HAM dalam pembelajaran PPKn mencakup berbagai aspek penting, termasuk norma, hukum, dan nilai-nilai HAM. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan HAM di Sekolah Dasar dan membentuk generasi yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

**Kata Kunci: Sekolah Dasar, HAM, PPKn**

### **Pendahuluan**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan tidak dapat diganggu oleh warga negara lainnya. Indonesia, sebagai negara hukum, telah menjamin hak-hak tersebut melalui pasal-pasal dalam UUD 1945, yang menunjukkan komitmen negara dalam mengakui dan menghormati HAM (Isra 2014). Sejarah ketatanegaraan Indonesia juga mencatat bahwa lembaga-lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan penegakan HAM. Secara obyektif, HAM merupakan hak yang melekat pada setiap manusia dan harus diakui serta dihormati oleh masyarakat dan pemerintah (Hemafitria & Rohani, 2021).

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aspek fundamental dalam membangun kesadaran sosial dan sikap saling menghargai di kalangan warga negara. Sejak dini, pemahaman mengenai HAM perlu ditanamkan untuk menciptakan generasi yang

memahami hak dan kewajibannya serta mampu menghormati hak-hak orang lain. Dalam konteks pendidikan formal di Indonesia, pendidikan HAM telah diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, salah satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn berfungsi sebagai wadah utama untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hak, dan pemahaman mengenai kewajiban warga negara (Fitriani, 2016). Dengan mengintegrasikan pendidikan HAM ke dalam PKn, diharapkan siswa dapat lebih memahami konsep-konsep hak asasi manusia dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sekolah Dasar menjadi fase pendidikan yang sangat strategis dalam pembentukan karakter anak. Pada tahap ini, peserta didik mulai belajar tentang nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat dan mengenali perbedaan hak dan kewajiban. Implementasi pendidikan HAM melalui pembelajaran PKn di Sekolah Dasar menjadi penting untuk membangun fondasi kesadaran HAM sejak dini. Penanaman nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PKn tidak hanya memperkenalkan siswa pada konsep-konsep dasar tentang hak, tetapi juga mengajarkan sikap toleransi, keadilan, dan saling menghormati (Putra, 2018). Dengan demikian, pengajaran ini berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang inklusif serta menghargai keberagaman.

Di Indonesia, perhatian terhadap pendidikan HAM di tingkat dasar terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan nasional. Kurikulum 2013, misalnya, menekankan pendidikan karakter yang terintegrasi, termasuk nilai-nilai HAM, dalam setiap mata pelajaran, termasuk PKn (Sari, 2019). Meski demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman guru mengenai materi HAM, terbatasnya sumber daya, dan pendekatan pengajaran yang kurang variatif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat agar pendidikan HAM dapat tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan kondisi siswa di tingkat dasar.

Pendidikan demokrasi memiliki peran penting dalam mengembangkan dan membentuk karakter kewarganegaraan yang berkontribusi pada terciptanya budaya kewarganegaraan yang dapat mewujudkan masyarakat madani. Tantangan konseptual dan praktis dalam pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengajaran HAM yang dilakukan secara kontekstual dan berbasis pengalaman memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap pemahaman siswa (Handayani & Putra, 2020). Melalui pembelajaran yang interaktif, siswa lebih mudah memahami makna dari hak dan kewajiban serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, perlu dikembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar pendidikan HAM tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga dapat mengubah cara pandang dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, guru memiliki peran penting sebagai fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan kesadaran HAM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan HAM melalui pembelajaran PKn di Sekolah Dasar, dengan fokus pada strategi pengajaran yang digunakan dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mengeksplorasi sejauh mana efektivitas pendidikan HAM dalam membangun pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang lebih efektif, sehingga pendidikan HAM dapat diimplementasikan secara optimal dan mampu membentuk karakter siswa yang menghargai hak asasi manusia (Wulandari, 2021).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengeksplorasi implementasi pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan pelaksanaan pendidikan HAM, yang melibatkan konteks sosial dan pendidikan yang kompleks. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menelusuri berbagai sumber akademik, termasuk jurnal, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan, guna mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang topik yang dibahas. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana teori dan praktik pendidikan HAM dikembangkan serta diimplementasikan dalam pembelajaran PKn di tingkat dasar (Sugiyono, 2017).

Dalam studi literatur, peneliti melakukan pengumpulan data melalui penelaahan terhadap literatur yang ada. Langkah ini melibatkan pencarian dan pemilihan literatur yang

relevan, baik yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, maupun dokumen resmi yang terkait dengan pendidikan HAM dan PKn di Indonesia. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang spesifik, seperti “pendidikan HAM di Sekolah Dasar,” “implementasi PKn,” dan “pengajaran HAM di Indonesia.” Peneliti kemudian menganalisis setiap sumber yang terpilih untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan temuan-temuan penting terkait dengan implementasi pendidikan HAM dalam kurikulum PKn.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses analisis data secara tematik. Analisis tematik bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari berbagai literatur yang dikaji, seperti strategi pengajaran HAM, tantangan dalam implementasi di Sekolah Dasar, serta peran guru dan lingkungan belajar dalam menanamkan nilai-nilai HAM. Data yang diperoleh kemudian diorganisasikan berdasarkan tema-tema ini, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pendidikan HAM diajarkan dan diterapkan dalam konteks pendidikan dasar. Pendekatan ini juga membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendidikan HAM, termasuk dukungan dari kebijakan pendidikan nasional dan kemampuan guru dalam menyampaikan materi HAM.

Kekuatan dari metode kualitatif studi literatur ini terletak pada kemampuannya untuk menggali informasi secara luas dari berbagai sumber dan memberikan perspektif yang holistik mengenai topik yang diteliti. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, terutama karena tidak melibatkan data empiris langsung dari praktik pengajaran di kelas. Meski demikian, dengan mengandalkan studi literatur yang sudah ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan lebih lanjut mengenai implementasi pendidikan HAM di Sekolah Dasar, khususnya dalam pembelajaran PKn (Moleong, 2018).

### **Hasil dan Pembahasan**

Pemahaman tentang HAM harus dimiliki oleh setiap individu. Dunia pendidikan dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman HAM, dimulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi melalui pendidikan HAM dan Pendidikan Kewarganegaraan. Peran HAM dalam pendidikan sangat signifikan dalam membentuk generasi penerus bangsa. Penegakan nilai-nilai HAM di dunia pendidikan dipengaruhi oleh pemahaman HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara yang terlibat. Jika HAM tidak

ditegakkan dalam pendidikan, proses tersebut akan menghasilkan generasi yang tidak menghormati martabat manusia, dan keberadaannya terabaikan, yang pada akhirnya dapat mengganggu perdamaian dunia.

Pendidikan HAM dapat diberikan tidak hanya melalui ceramah melainkan juga melalui perilaku guru di sekolah sebagai *role model* penegak HAM. Dalam konteks Sekolah Dasar, implementasi Pendidikan Kewarganegaraan terkait dengan pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) masih sering terbatas pada aspek kognitif dan kurang dipahami dengan baik. Hal ini menyebabkan banyak kesalahan dalam konsep maupun penerapannya. Guru di Sekolah Dasar terkadang kurang memperhatikan hak-hak siswa dalam proses pembelajaran, bahkan ada yang bersikap otoriter, menempatkan diri sebagai pihak yang selalu benar. Sikap guru seperti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kurang menghargai hak asasi siswa, terutama hak mereka untuk menyampaikan pendapat.

Pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai HAM tidak dapat terjadi melalui pendekatan indoktrinasi. Dengan kata lain, proses sosialisasi HAM seharusnya terjadi dalam hubungan yang reflektif dan saling menghargai antara guru dan siswa, di mana siswa diberikan ruang untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran yang melibatkan dialog dan kolaborasi akan lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai HAM dan demokrasi sejak dini.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hemafitria & Rohani, 2021 didapatkan hasil bahwa implementasi pendidikan HAM di program studi PPKn dikatakan berjalan dengan baik, apabila adanya sikap saling menghargai dan menghormati antara tenaga pendidik dan siswa, serta tidak adanya diskriminasi di antara mereka. Guru melaksanakan pendidikan HAM dalam pembelajaran dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya menghormati dan menghargai hak asasi orang lain.

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di Sekolah Dasar dapat berfungsi sebagai landasan untuk membentuk warga negara yang baik. Konsep spesifik yang telah dipahami oleh anak-anak dapat dijadikan dasar pengajaran. Sekolah Dasar berperan penting dalam mengenalkan anak-anak pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Penting untuk memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, implementasi pendidikan HAM di tingkat Sekolah Dasar menjadi upaya awal dalam menanamkan kesadaran HAM sejak dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi & Hidayah (2021) menyatakan bahwa kesadaran akan pentingnya menghindari penggunaan hukuman yang dominan merupakan salah satu bentuk implementasi HAM di sekolah. Hal ini diperlukan untuk memastikan akses terhadap pendidikan yang penuh kasih. Dalam konteks pendidikan HAM di Sekolah Dasar, hal ini juga bertujuan untuk memastikan siswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang HAM. Ketidaksetaraan yang muncul akibat kelas, usia, dan faktor lain dalam dunia global saat ini telah menciptakan ketidakseimbangan structural. Dalam hal ini, posisi pendidikan HAM di Sekolah Dasar sangat membantu dalam mewujudkan masyarakat yang bebas dari pelanggaran HAM.

Terdapat beberapa strategi dalam pembelajaran HAM untuk mencapai tujuannya, yaitu mempersiapkan pembelajaran dengan menentukan tujuan yang jelas, memahami karakteristik peserta didik, menyusun materi secara efektif, mempertimbangkan situasi dan konteks pembelajaran, menyediakan sumber-sumber belajar, mengatur waktu dengan baik, serta memilih metode pembelajaran yang tepat. Ada dua faktor yang memengaruhi implementasi

1. Faktor internal : Kesadaran siswa untuk diperlakukan adil oleh guru dan teman sekelasnya.
2. Faktor eksternal : Pengaruh dari teman-teman di sekitar mahasiswa yang memengaruhi sikap mereka terhadap HAM.

Kendala utama bagi guru dalam mengembangkan nilai-nilai sila kedua Pancasila, yang terkait dengan penghormatan hak asasi manusia, terletak pada kesulitan dalam menanamkan teori dan konsep HAM, terutama saat harus melibatkan seluruh elemen kehidupan bermasyarakat.

Faktor keluarga juga berperan penting dalam membentuk sikap siswa, di mana sifat egois dan mementingkan diri sendiri masih kuat. Kebiasaan kurang baik dari rumah sering kali terbawa ke lingkungan sekolah, sehingga menyebabkan sulitnya menerapkan pembelajaran HAM secara efektif baik di dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi nilai-nilai karakter melibatkan beberapa pihak menurut penelitian yang dilakukan oleh Hemafitria dan Rohani (2021):

1. Kepala sekolah : Mensosialisasikan kebijakan sekolah tentang pendidikan karakter dan memberikan teladan dalam implementasi nilai-nilai karakter.

2. Guru : Menjadi pusat peradaban di sekolah, memberi kesempatan siswa untuk berpendapat, dan menilai secara adil serta transparan.
3. Staf pendidikan: Berperan dengan berpenampilan rapi dan berperilaku sopan.
4. Orangtua/masyarakat: Berperan sebagai mediator dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah serta pelatihan yang melibatkan para ahli.

Sinergi antara seluruh elemen ini menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk penguatan pendidikan karakter.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fahrurrohman (2015) implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar (SD) dapat terlihat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN). Dalam kurikulum PPKN, terdapat berbagai aspek penting yang menjadi fokus pembelajaran, di antaranya adalah persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan. Salah satu aspek utama yang ditekankan adalah pemahaman tentang HAM, yang mencakup beberapa poin penting seperti hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, serta instrumen nasional dan internasional terkait HAM. Selain itu, pembelajaran PPKN juga mencakup pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM, yang merupakan landasan penting dalam membangun kesadaran siswa tentang hak-hak mereka.

Melalui pendidikan ini, siswa diharapkan dapat memahami kebutuhan sebagai warga negara, mengenal konstitusi negara, serta memahami kekuasaan dan politik. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara juga diajarkan sebagai nilai-nilai yang harus dipegang oleh setiap warga negara. Dalam konteks globalisasi, siswa diajak untuk memahami dampak global terhadap kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PPKN di Sekolah Dasar tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga membekali siswa dengan nilai-nilai kemanusiaan yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## **Kesimpulan**

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) harus dipahami oleh setiap individu, dan dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman ini, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar (SD) terlihat pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN), yang mencakup berbagai aspek penting,

termasuk norma, hukum, dan nilai-nilai HAM. Pendidikan ini diharapkan dapat membentuk generasi penerus yang menghargai martabat manusia dan memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara. Namun, implementasi pendidikan HAM sering kali terbatas pada aspek kognitif, dengan beberapa guru masih kurang memperhatikan hak siswa, bahkan bersikap otoriter, yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi pembelajaran yang melibatkan dialog dan kolaborasi antara guru dan siswa, serta kesadaran akan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sikap siswa terhadap HAM. Sinergi antara kepala sekolah, guru, staf pendidikan, dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi penerapan pendidikan HAM. Dengan demikian, pendidikan HAM di SD bukan hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga membekali siswa dengan nilai-nilai kemanusiaan yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

#### Daftar Pustaka

- Fahrurrohman, O. (2015). Implementasi pendidikan HAM dalam Pembelajaran di SD/MI. *Journal of Primary*, 7(2), 250.
- Fitriani, A. (2016). Integrasi Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(2), 123-135.
- Handayani, S. & Putra, A. (2020). Strategi Pengajaran Hak Asasi Manusia di Sekolah Dasar: Studi Implementasi di Jakarta. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 30-42.
- Hemafitria, H., & Rohani, R. (2021). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Program Studi Ppkn Ikip Pgri Pontianak. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(1), 40-48. <https://doi.org/10.24176/re.v12i1.5658>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Pertiwi, S. G., & Hidayah, Y. (2021). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dunia Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 376-380. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1717>
- Putra, A. (2018). Tantangan Implementasi Pendidikan HAM di Sekolah Dasar. *Jurnal*

*Pendidikan Dasar*, 7(3), 45-60.

Sari, M. (2019). Pendidikan HAM melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Tingkat Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 89-102.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.